

## **ABSTRAK**

### **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Empat Desa Pada Dua Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu Selatan)**

**Oleh: Zebby Zara**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gunung Kayo, Desa Tanjung Tebat, Desa Pagar Dewa, dan Desa Padang Berangin. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat tercermin melalui tiga indikator, yaitu partisipasi, transparansi, dan responsif.

Jenis penelitian ini deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui proses wawancara semiterstruktur dengan observasi, dokumentasi, dan triangulasi sumber sebagai pelengkapannya. Dengan nara sumber Nara sumber yang dipilih dalam penelitian ini yaitu pertama, kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kedua, bendahara desa yang bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Ketiga, perwakilan dari badan permusyawaratan desa yang ikut serta dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa. Pada tahap perencanaan ke empat desa ini sudah menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi dengan baik. Terbukti dari banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan rancangan kegiatan pembangunan desa. Dan setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan proses perencanaan dilaukan secara terbuka melalui musyawarah bersama yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh-tokoh masyarakat. Pada tahap pelaksanaan ke empat desa ini sudah menerapkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabel. Hal ini terbukti dari adanya papan informasi di setiap lokasi kegiatan pembangunan dan di kantor kepala desa, masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dan adanya pertanggungjawaban dari tim pelaksana berupa laporan kegiatan yang nantinya akan dievaluasi bersama pada musyawarah terbuka yang dihadiri oleh BPD dan tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi untuk desa tanjung tebat masih kesusahan dalam pembuatan laporan karena tidak adanya pendamping desa yang dapat membantu. Pada tahap pertanggungjawaban ke empat desa ini sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel. Terbukti dengan adanya laporan disetiap kegiatan dan selalu di evaluasi bersama setiap tiga bulan sekali yang melibatkan BPD dan tokoh-tokoh masyarakat pada musyawarah bersama. Tetapi masih kurangnya tenaga ahli dalam pembuatan laporan.